

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**2017-2020**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**RIFKY NUR FASHA**

**1601035230**

**S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020  
Nama : Rifky Nur Fasha  
NIM : 1601035230  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 30 Januari 2023  
Dosen Pembimbing



Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660321 199503 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 17 Januari 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

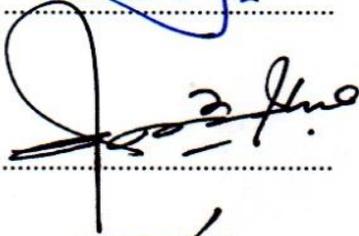
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda  
2017-2020  
Nama : Rifky Nur Fasha  
NIM : 1601035230  
Hari : Selasa  
Tanggal Ujian : 17 Januari 2023

**TIM PENGUJI**

1. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA  
NIP. 19660321 199503 1 001

2. Dr. Jamaluddin MD, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 19680405 199512 1 002

3. Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, S.E.,M.Si.,CSP  
NIP. 19770328 200312 2 001

1.   
.....  
2.   
.....  
3.   
.....

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, keucalic yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 17 Januari 2023



Rifky Nur Fasha

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifky Nur Fasha

NIM : 1601035230

Program Studi : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Samarinda  
Tanggal 11 Desember 2022  
Yang menyatakan,



Rifky Nur Fasha

## RIWAYAT HIDUP



Rifky Nur Fasha dilahirkan di Muara Kedang, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Desember 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Kaslian Nur dan Ibu Ruspa. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 001 Bongan dan lulus pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Sendawar dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bongan dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2016.

Melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2016, penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Kota Samarinda dengan memilih Jurusan Pendidikan Akuntansi melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN), penulis Aktif sebagai anggota dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis selama satu tahun. Kemudian, pada tahun 2020 melakukan program Kuliah Kerja Nyata angkatan 46 bertempat di Desa Gurimbang, Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 11 Desember 2022

Penulis

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020**”

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan izin untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, S.E.,M.Si, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah membantu dan

memfasilitasi penulis serta memberikan arahan untuk menyelesaikan pendidikan program S-1.

5. Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta sarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal.
6. Bapak/Ibu Dosen dan para staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya dan membantu membimbing pada perkuliahan.
7. Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Kaslian Nur dan Ibunda Ruspa selaku orang tua teladan yang memberikan kasih dan sayang serta doa yang tidak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikan-nya.
9. Ners. Rizky Arian Nur S.Kep, Rofhy Agil Raihan dan Siti Raisa Alike Kayana selaku kakak dan adik kandung yang saya sayangi.
10. Anisa Karina Citra Pratiwi, Amd.Kep selaku kekasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Mahasiswa/i Akuntansi 2016 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dan saran-saran selama penulis mengikuti studi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, menyadari masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

**Wasalamu'alikum Wr.Wb.**

Samarinda, 11 November 2022

Penulis



Rifky Nur Fasha

## ABSTRAK

Rifky Nur Fasha. 2022. “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020**”. Dibimbing oleh Bapak Raden Priyo Utomo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kota Samarinda, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda mengenai analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah mencapai target, termasuk dalam kategori sangat efektif hal ini terlihat dari lebih besarnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kota Samarinda dinilai sangat efisien karena dinilai mampu menghemat anggaran. Hal ini terjadi dari adanya tingkat dan kriteria yang ditentukan serta sesuai target yang dicapai.

**Kata Kunci:** laporan; realisasi; anggaran; efektif; efisien; pendapatan dan belanja daerah

## **ABSTRACT**

*Rifky Nur Fasha. 2022. "Analysis of Reports on the Realization of Regional Revenue and Expenditure Budgets in the City Government of Samarinda 2017-2020". Supervised by Mr. Raden Priyo Utomo. The purpose of this study was to analyze the extent to which the level of effectiveness and efficiency in realizing the local government revenue and expenditure budget in Samarinda City, the analytical method used is a quantitative descriptive method using data collection techniques, namely documentation techniques. The results of research conducted at the Samarinda City Regional Financial and Asset Management Agency regarding the analysis of reports on the realization of the regional revenue and expenditure budget (APBD) show that revenue performance has reached the target, included in the very effective category, this can be seen from the larger amount realized compared to the budgeted. Meanwhile, the performance of local government spending in Samarinda City is considered very efficient because it is considered capable of saving the budget. This happens from the existence of levels and criteria that are determined according to the targets achieved.*

*Keywords: report; realization; budget; effective; efficient; regional income and expenditure*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Anggaran .....	6
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	6
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	6
2.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	7
2.2.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APBD .....	10
2.2.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	14
2.3 Laporan Realisasi Anggaran .....	15
2.3.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran .....	15
2.3.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran .....	15
2.3.3 Ruang Lingkup laporan Realisasi Anggaran .....	16
2.3.4 Manfaat laporan Realisasi Anggaran .....	16
2.4 Laporan Keuangan Daerah .....	17
2.5 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah .....	18
2.5.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	18

2.5.2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah .....	18
2.6 Penelitian Terdahulu .....	19
2.7 Rerangka Konseptual .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	23
3.2 Jenis Penelitian .....	23
3.3 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian .....	24
3.3.1 Tempat Penelitian .....	24
3.3.2 Waktu Penelitian .....	24
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.6 Alat Analisis .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	27
4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan BPKAD Kota Samarinda .....	29
4.1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda .....	29
4.2 Hasil Penelitian .....	31
4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	36
4.2.2 Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	39
4.2.3 Perhitungan dan Analisis Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	43
4.3 Pembahasan .....	50
4.3.1 Rasio Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2020 .....	50
4.3.2 Rasio Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2020 .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Simpulan .....	57
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020 .....	3
Tabel 1.2 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020 .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Efektivitas PAD .....	26
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Secara Umum .....	26
Tabel 4.1 Laporan Realisasi PAD Kota Samarinda 2017-2020.....	31
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Samarinda 2017-2020 .....	32
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Kota Samarinda 2017-2020 .....	33
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Belanja Operasi Kota Samarinda 2017-2020 .....	34
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Belanja Modal Kota Samarinda 2017-2020 .....	34
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Samarinda 2017-2020 .....	35
Tabel 4.7 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2017 .....	36
Tabel 4.8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018 .....	37
Tabel 4.9 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019 .....	37
Tabel 4.10 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020 .....	38
Tabel 4.11 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017.....	39
Tabel 4.12 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018.....	40
Tabel 4.13 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 .....	41
Tabel 4.14 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020 .....	41
Tabel 4.15 Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2020 .....	42
Tabel 4.16 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2020 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Rerangka Konsep .....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	30
Gambar 4.2 Grafik Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020 .....	43
Gambar 4.3 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian .....	62
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda 2016.....	63
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda 2017.....	65
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda 2018.....	67
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda 2019.....	69
Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Samarinda 2020.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan suatu perencanaan organisasi dalam merealisasikan kegiatannya. Anggaran perlu dibuat sebaik mungkin agar efektif dan efisien. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian, 2013).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun semaksimal mungkin sebagai bahan dalam pengambilan suatu kebijakan, pengalokasian, maupun distribusi sumber daya yang harus dikembalikan kemasyarakat umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah (Badrudin, 2017).

Pemerintah daerah adalah organisasi publik yang mengatur kegiatan pemerintah daerahnya. Organisasi publik pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kemakmuran hidup dengan mengelola sumber daya yang berbeda di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka

semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017).

Tujuan Desentralisasi dan transparansi akuntabilitas, yaitu pemerintahan daerah harus mengelola sistem penganggaran yang ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu membangun daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan yang penting dalam suatu daerah. Oleh karena itu dalam merealisasikan belanja di tingkatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan (*spending wisely*). Ukuran rasio lain efektivitas yaitu sasaran dan tujuan mendekati 1 (satu) atau sama dengan 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Sedangkan efisien dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. (Mardiasmo, 2012).

Kalimantan Timur merupakan suatu diantara provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki sumber daya cukup, sehingga dapat merealisasikan pendapatan yang dapat membiayai pembangunan di tempatnya. Pemerintah daerah dalam melakukan kategorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak terbebas dari cara pemograman serta penganggaran. Sebab pemograman serta penganggaran ialah 2 cara yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu,

pemograman serta pembangunan yang sudah dibuat wajib dalam kategorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Tabel 1.1 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2017	2.363.197.387	2.288.550.678	96,84
2018	2.542.658.336	2.700.306.264	106,20
2019	3.064.327.330	3.345.420.495	109,18
2020	2.592.819.129	2.872.836.034	110,80

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 laporan realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.363.197.387 tahun 2018 sebesar Rp2.542.658.336 tahun 2019 sebesar Rp3.064.327.330 dan tahun 2020 sebesar Rp2.592.819.129.

**Tabel 1.2 Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2017	2.283.031.685	2.541.344.738	89,84
2018	2.515.289.345	2.724.630.701	92,32
2019	3.065.215.869	3.429.356.081	89,38
2020	2.976.086.465	3.236.053.860	91,97

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 1.2 laporan realisasi belanja pada pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.541.344.738 tahun 2018 sebesar Rp2.724.630.701 tahun 2019 sebesar Rp3.429.356.081 tahun 2020 sebesar Rp3.236.053.860.

Dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2020 laporan realisasinya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi yaitu ketidak tetapan kadang

mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah pada tiap tahunnya. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya.

Analisis realisasi ini dilakukan pada Pemerintah Kota Samarinda yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD adalah sebagai penyelenggara perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda 2017-2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang di teliti adalah:

1. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Sudah Efektif?
2. Apakah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Sudah Efisien?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2020.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan sebenarnya.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternative untuk meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anggaran**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estemasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran.

(Nafarin, 2013) menyatakan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.

Sedangkan penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai, masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

#### **2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

##### **2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah konsep keuangan pemerintah sepanjang satu tahun yang diresmikan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

APBD ialah instrumen yang menjamin terciptanya patuh dalam cara pengumpulan ketetapan terpaut dengan kebijaksanaan pendapatan ataupun belanja daerah. Dalam bagan patuh anggaran, kategorisasi anggaran, baik pendapatan ataupun belanja, serta wajib merujuk pada ketentuan ataupun prinsip yang melandasinya. Oleh sebab itu, dalam cara kategorisasi APBD, penguasa wilayah wajib menjajaki metode administratif yang diresmikan (Yuliastati, 2019).

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan, dan Pos Lain- lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

Selanjutnya untuk Dana Pertimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah Pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.2.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan

penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah meliputi, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Pertimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencakupi:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintahan (BUMN)
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi :
  - a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
  - b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.

## 2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan

pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Klasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari :

1) Belanja Operasi, Belanja Operasi meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pembelian Tanah yang akan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai semua keperluan yang bersifat tidak terduga.

4) Belanja transfer, Belanja transfer terdiri dari :

- a. Belanja bagi hasil
- b. Belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sekarang maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- 1) Pembiayaan Penerimaan
  - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu
  - b) Pencairan Dana Cadangan
  - c) Penerimaan Pinjaman Daerah
  - d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
  - f) Penerimaan piutang daerah
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
  - a) Pembentukan dana cadangan
  - b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
  - c) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
  - d) Pemberian pinjaman daerah

### **2.2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam Penyusunan APBD**

#### **1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah

adalah : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Wakil ketua dapat terdiri atas wakil 1 dan wakil ketua 2. wakil ketua TAPD dapat berasal dari lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Sekretaris TAPD terdiri atas sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sama halnya dengan wakil ketua, sekretaris daerah dapat berasal dari lingkungan SKPKD dan BPKAD. Anggota TAPD dapat berasal dari berbagai SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Secara rinci tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menyusun dan membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran.
- 3) Menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- 4) Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- 5) Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Pertanggung jawaban APBD.
- 6) Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggung jawaban APBD.

- 7) Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 8) Menyiapkan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- 9) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD.

## 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang. SKPD meliputi Dinas, Badan, Sekretariat, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan (Desa). Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peran pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tugas pokok Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, membahas Rencana Kerja dan Anggaran, (RKA) yang disusun oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengkompilasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan membuat Nota Keuangan.

#### 4. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) adalah unsur pembantu pemimpin Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lain.

#### 5. Kepala Daerah

Kepala Daerah merupakan pemimpin eksekutif pada pemerintahan daerah atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tugas pokok kepala daerah dalam menyusun APBD adalah :

- a. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama.
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,

dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- d. Menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga legislatif pada Pemerintah Daerah. Peran pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah membahas dan membuat kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pemerintah daerah.

#### **2.2.4 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi yaitu :

##### 1. Fungsi Otorisasi

Merupakan dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

##### 2. Fungsi Perencanaan

Fungsi ini merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

### 3. Fungsi Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 4. Fungsi Alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

### 5. Fungsi Distribusi

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 6. Fungsi Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## **2.3 Laporan Realisasi Anggaran**

### **2.3.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perturan perundang-undangan.

### **2.3.3 Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran**

1. Pernyataan standar ini ditetapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan yang disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan standar ini berlaku setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat baik maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
3. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

### **2.3.4 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporn terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan realiasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

#### **2.4 Laporan Keuangan Daerah**

(Harahap, 2013) menyatakan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

(Erlina, 2013) menyatakan tentang laporan keuangan daerah adalah: “Laporan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan”.

## 2.5 Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan dari laporan realiasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dianalisis kinerja pendapatan dan belanja dengan analisis sebagai berikut:

### 2.5.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektif keuangan daerah otonomi (Selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2011).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 2.5.2 Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisien ini tidak mutlak, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Aisah, 2019)	Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016.	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumen – dokumen resmi. Data yang digunakan data sekunder.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pemerintah Kota Samarinda secara umum dikatakan baik. (1) analisis varians belanja yang efisien dan efektif tidak melebihi anggaran. (2) analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2010 – 2016 mengalami peningkatan, kecuali 2016 mengalami penurunan. (3) analisis efisiensi belanja mampu menghemat anggaran belanja dengan baik dan efisiensi.
2.	(Dien et al, 2015)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektif dan efisien.	Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektif penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat kriteria efisien anggaran dan belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan pengguna anggaran belanja yang terlalu berlebihan.

*Disambung Ke Halaman Berikutnya*

**Tabel 2.1 Sambungan**

3.	(Daling, 2013)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil Penelitian	Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif.	Hasil penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan cukup efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan yaitu dengan rata sebesar 97,71%. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA Surplus.
4.	(Elim et al.,2015)	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu.	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.	Dari hasil perhitungan rasio efisien belanja, maka dapat dilihat T.A2013-2014 pemerintah kota kotamobagu dapat melakukan penghematan anggaran sebesar 12,73%.
5.	(Fatmala, 2020)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rasio Efektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan kinerja setiap tahun mengalami peningkatan (Efektif). (2) Rasio Efisiensi Kantor Camat Pakue tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan efisiensi.

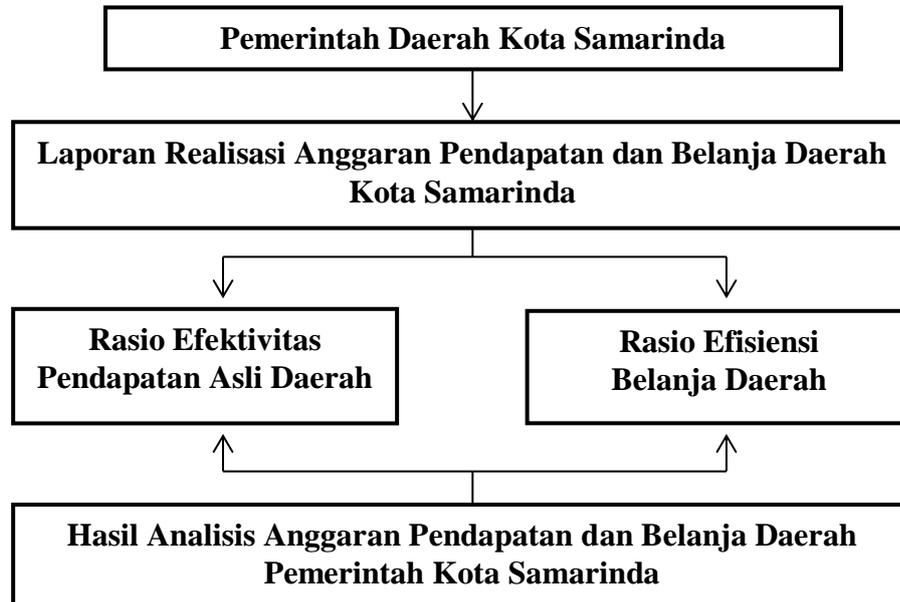
*Disambung Ke Halaman Berikutnya*

**Tabel 2.1 Sambungan**

6.	(Anastasia et al., 2015)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.	Metode penelitian ini menggunakan metode evaluasi.	Kinerja belanja pemerintah kota manado dilihat dari dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Manado dapat dikatakan baik karena realisasi belanjanya tidak adayang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya rata- rata sebesar 90,75%.
7.	Rukayah et al., (2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Hasil Penelitian rasio efektifnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif.	Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.	Efektif dan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang tahun anggaran 2014–2016 dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektifnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dan pada rasio efisiennya dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiennya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efisien.
8.	(Saputra et al., 2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014.	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data deskriptif kuantitatif dengan metode pencatatan dokumen dan dianalisis dengan rasio keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisiensi.

Sumber: Data Olahan

## 2.7 Rerangka Konseptual



Gambar 2.1 Rerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa didalam sebuah penelitian ada sesuatu yang menjadi sasaran, misalnya variabel ini tadi. Beberapa batasan dan pengertian dasar atau konsep operasional dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Variabel Independen**

Variabel independen merupakan suatu variabel bebas yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah rasio keuangan seperti analisis efektivitas, dan analisis efisiensi.

##### **2. Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel dependen untuk mengetahui objek variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek variabel dependen adalah Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang berupa nilai ataupun angka.

### **3.3 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, Jl. Dahlia, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini fokus pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah pemerintah Kota Samarinda, yaitu tahun anggaran 2017-2020.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Pengambilan data pada penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Maret 2022 sampai bulan April 2022.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Penelitian menggunakan data sekunder karena penelitian mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dan data lain yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Sumber data yang dipergunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah Kota Samarinda tahun 2017–2020.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, metode dalam penelitian ini adalah dokumentasi. (Sugiyono, 2013) menyatakan dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan mengumpulkan laporan realisasi anggaran (LRA) Kota Samarinda tahun 2017-2020 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

### 3.6 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. (Sugiyono, 2013) menyatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dicoba guna mengenali nilai variabel mandiri, bagus sesuatu variabel ataupun lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, ataupun mengaitkan dengan variabel lain. Dengan Penelitian Deskriptif, kumpulan informasi yang didapat bakal tersaji dengan singkat serta rapi dan bisa membagikan data inti dari kumpulan informasi yang terdapat.

Data laporan keuangan daerah dalam bentuk realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Efektivitas Pendapata Asli Daerah

Rasio efektif pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi PAD sesuai target.

Rumus PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Efektivitas PAD**

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 – 90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	< 60

*Sumber: Mahsun, 2013*

## 2. Analisis Efisien Belanja Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).

Efisien belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Secara Umum**

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Efisien	> 100
Kurang Efisien	90 – 100
Cukup Efisien	80 – 90
Efisien	60 – 80
Sangat Efisien	< 60

*Sumber: Mahsun, 2013*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pemerintah kota merupakan penyelenggara urusan Pemerintah dikepalai oleh Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam membuat peraturan maupun kebijakan umum dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Samarinda harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar atau pedoman kerja serta dapat membiayai seluruh program dan kegiatannya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.

Sistematika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan tahap Perencanaan. Kegiatan perencanaan diadakan dengan melakukan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) guna menyerap atau menampung aspirasi dari masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh tim penyusun RKPD diakhiri dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah tahap penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan

menyampaikan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk disepakati bersama.

Setelah penyusunan dan disepakati bersama, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kepala Daerah akan menerbitkan Surat Edaran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Berdasarkan Surat Edaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD, maka setiap SKPD menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) dan menyampaikan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Gubernur mengevaluasi Raperda tentang APBD dan menyerahkan kepada kepala Daerah untuk disempurnakan.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur.

#### **4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan BPKAD Kota Samarinda**

**Visi :**

"Terwujudnya sistem Administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dilindungi Pemerintah Kota Samarinda yang profesional kredibel, transparan dan akuntabel secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang keuangan"

**Misi :**

1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan.

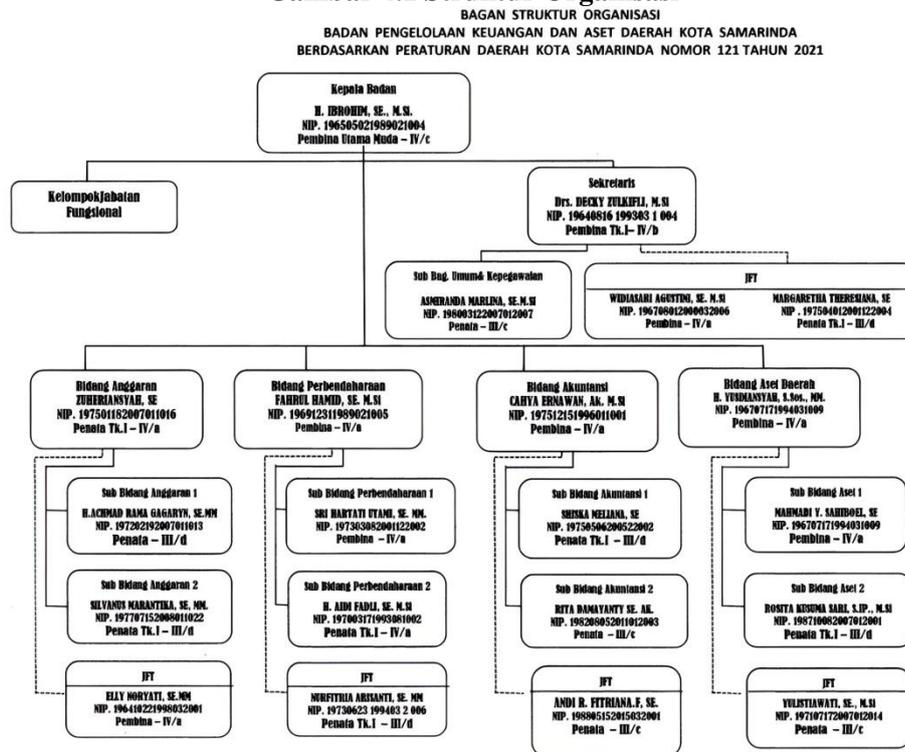
**Tujuan :**

"Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah demi terwujudnya optimalisasi pengendalian keuangan dan manajemen pelaporan aset daerah serta pengelolaan administrasi yang profesional"

#### **4.1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda**

Berdasarkan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja BPKAD Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program
  - d. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi
6. Bidang Aset

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan membahas bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020. (Mardiasmo, 2012) Menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

### 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Realisasi PAD pemerintah Kota Samarinda tahun 2017-2020

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Pendapatan Pajak Daerah	298.972.840	352.827.149	369.978.459	314.002.648
2	Retribusi Daerah	52.123.941	48.480.939	49.520.199	42.755.656
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.057.498	11.707.898	12.482.957	8.010.873
4	Lain-lain PAD Yang Sah	163.486.525	85.872.677	128.463.241	120.420.315
5	<b>Jumlah</b>	<b>519.640.806</b>	<b>498.888.664</b>	<b>560.444.857</b>	<b>485.189.493</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.1 menunjukkan nilai realisasi pendapatan asli daerah pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017 Rp519.640.806 tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp498.888.664 tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp560.444.857 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp485.189.493

## 2. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari entitas lain, misal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom lain dalam rangka desentralisasi disebut dana perimbangan.

Berikut realisasi pendapatan transfer Kota Samarinda tahun 2017-2020

**Tabel 4.2 Laporan Realisasi Pendapatan Transfer  
Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	359.925.240	617.118.964	840.987.799	628.876.406
2	Dana Alokasi Umum	653.465.507	659.322.535	707.113.978	670.356.522
3	Dana Alokasi Khusus	238.686.091	234.160.199	256.326.317	230.887.008
4	<b>Jumlah</b>	<b>1.252.076.838.</b>	<b>1.510.601.699</b>	<b>1.804.428.094</b>	<b>1.530.119.937</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.2 menunjukkan realisasi pendapatan transfer pemerintah Kota Samarinda Mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 kecuali tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan. Realisasi pendapatan transfer periode tahun 2017 sebesar Rp1.252.076.838 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.510.601.699 dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.804.428.094 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.530.119.937.

### 3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Digunakan untuk kegiatan belanja daerah yang diusahakan daerah dengan cara ketentuan yang berlaku.

**Tabel 4.3 Laporan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah  
Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus	-	-	30.087.063	35.336.461
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	338.713.381	400.575.181	392.307.362	286.846.897
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	178.119.651	208.483.453	475.603.398	439.042.500
4	Pendapatan Hibah	-	81.757.265	82.649.720	96.300.745
5	<b>Jumlah</b>	<b>516.833.032</b>	<b>960.815.900</b>	<b>950.560.480</b>	<b>822.190.142</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi lain-lain pendapatan yang sah pemerintah Kota Samarinda Mengalami kenaikan dari tahun 2017-2018, kecuali tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 sebesar Rp516.833.032 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp960.815.900 sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp950.560.480, dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp822.190.142.

### 4. Realisasi Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Berikut ini adalah data tabel belanja operasi Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 4.4 Laporan Realisasi Belanja Operasi  
Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	931.254.208	1.214.251.946	1.268.404.148	1.216.845.222
2	Belanja Barang dan Jasa	618.903.996	456.353.896	564.254.051	467.029.982
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	26.878.063	26.470.650	22.179.165	132.303.696
5	Bantuan Sosial	-	-	1.907.500	-
6	Bantuan Keuangan	1.197.406	-	-	-
7	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
8	<b>Jumlah</b>	<b>1.578.033.675</b>	<b>1.697.076.492</b>	<b>1.856.744.865</b>	<b>1.816.178.901</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi pemerintah Kota Samarinda Mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi belanja operasi periode tahun 2017 sebesar Rp1.578.033.675 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.697.076.492 dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.856.744.865 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.816.178.901.

#### 5. Realisasi Belanja Modal

Belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang dimiliki manfaat masa ekonomi lebih dari satu periode akuntansi.

Berikut ini adalah data realisasi belanja modal pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 4.5 Laporan Realisasi Belanja Modal  
Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	6.424.204	20.326.281	31.076.114	14.754.178
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.343.774	61.199.821	137.466.786	115.771.805

Disambung Ke Halaman Berikutnya.

**Tabel 4.5 Sambungan**

<b>3</b>	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.569.370	156.394.852	167.062.262	121.835.065
<b>4</b>	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	472.609.691	550.373.428	841.608.661	809.804.044
<b>5</b>	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	573.010	782.190	3.083.438	3.948.049
<b>6</b>	Belanja Modal Dana BOS	21.514.520	28.102.452	26.407.779	-
<b>7</b>	<b>Jumlah</b>	<b>702.034.572</b>	<b>817.179.025</b>	<b>1.206.777.043</b>	<b>1.066.113.143</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah Kota Samarinda mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi belanja modal tahun 2017 sebesar Rp702.034.572 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp817.179.025 dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.777.043 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.066.113.143.

#### 6. Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Berikut ini adalah data realisasi belanja tak terduga pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 4.6 Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>1</b>	Belanja Tak Terduga	2.963.437	1.033.828	1.693.960	93.794.421
<b>2</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2.963.437</b>	<b>1.033.828</b>	<b>1.693.960</b>	<b>93.794.421</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa realisasi belanja tak terduga pemerintah Kota Samarinda tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi belanja tak terduga periode tahun 2017 sebesar Rp2.963.437 tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.033.828 sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.693.960 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp93.794.421.

#### 4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 4.7 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2017**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persentasi %
<b>Pendapatan</b>	<b>2.363.197.387</b>	<b>2.288.550.678</b>	<b>96,84</b>
Pendapatan Asli Daerah	507.247.746	519.640.806	102,44
Pendapatan Transfer	1.854.941.640	1.768.909.871	95,36
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.008.000	0	0,00
<b>Belanja</b>	<b>2.541.344.738</b>	<b>2.283.031.685</b>	<b>89,84</b>
Belanja Operasi	1.760.542.464	1.578.033.675	89,63
Belanja Modal	777.802.273	702.034.572	90,26
Belanja Tak Terduga	3.000.000	2.963.437	98,78
Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>178.147.350</b>	<b>179.156.846</b>	<b>100,57</b>
Penerimaan Daerah	179.155.350	179.156.846	100,00
Pengeluaran Daerah	1.008.000	0	0,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.7 laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Samarinda tahun 2017 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp2.363.197.387 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.288.550.678 atau 96,84%, anggaran belanja sebesar Rp2.541.344.738 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp2.283.031.685 atau 89,84%, anggaran pembiayaan sebesar Rp178.147.350 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp179.156.846 atau 100,57%.

Pada anggaran tahun 2017 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Tabel 4.8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persentasi %
<b>Pendapatan</b>	<b>2.542.658.336</b>	<b>2.700.306.264</b>	<b>106,20</b>
Pendapatan Asli Daerah	445.353.498	498.888.664	112,02
Pendapatan Transfer	1.974.656.073	2.119.600.334	107,34
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	122.648.764	81.757.265	66,66
<b>Belanja</b>	<b>2.726.534.176</b>	<b>2.517.192.820</b>	<b>92,32</b>
Belanja Operasi	1.810.861.869	1.697.076.492	93,72
Belanja Modal	910.768.831	817.179.025	89,72
Belanja Tak Terduga	3.000.000	1.003.828	34,46
Transfer Bantuan Keuangan	1.903.474	1.903.474	100,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>183.875.840</b>	<b>183.883.840</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	184.675.840	184.675.840	100,00
Pengeluaran Daerah	800.000	792.000	99,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.8 laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Samarinda tahun 2018 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp2.542.658.336 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.700.306.264 atau 106,20%, anggaran belanja sebesar Rp2.726.534.176 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp2.517.192.820 atau 92,32%, anggaran pembiayaan sebesar Rp183.875.840 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp183.883.840 atau 100,00%. Pada anggaran tahun 2018 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Tabel 4.9 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persentasi %
<b>Pendapatan</b>	<b>3.064.327.330</b>	<b>3.345.420.495</b>	<b>109,18</b>
Pendapatan Asli Daerah	500.991.118	560.444.857	111,87
Pendapatan Transfer	2.463.926.211	2.702.425.917	109,68
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	99.410.000	82.649.720	83,14
<b>Belanja</b>	<b>3.431.324.613</b>	<b>3.067.184.401</b>	<b>89,38</b>
Belanja Operasi	2.063.362.673	1.856.744.865	89,99
Belanja Modal	1.360.993.408	1.206.777.043	88,67
Belanja Tak Terduga	5.000.000	1.693.360	33,88
Transfer Bantuan Keuangan	1.968.531	1.968.531	100,00

Disambung Ke Halaman Berikutnya

**Tabel 4.9 Sambungan**

<b>Pembiayaan</b>	<b>366.997.283</b>	<b>366.997.283</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	366.997.283	366.997.283	100,00
Pengeluaran Daerah	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.9 laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Samarinda tahun 2019 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp3.064.327.330 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp3.345.420.495 atau 109,18%, anggaran belanja sebesar Rp3.431.324.613 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp3.067.184.401 atau 89,38%, anggaran pembiayaan sebesar Rp366.997.283 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp366.997.283 atau 100,00%. Pada anggaran tahun 2019 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Tabel 4.10 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentasi %</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>2.592.819.129</b>	<b>2.872.836.034</b>	<b>110,80</b>
Pendapatan Asli Daerah	392.727.879	485.189.493	123,54
Pendapatan Transfer	2.097.155.527	2.291.345.796	109,26
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	102.935.723	96.300.745	93,55
<b>Belanja</b>	<b>3.238.152.506</b>	<b>2.978.185.111</b>	<b>91,97</b>
Belanja Operasi	1.941.877.842	1.816.178.901	93,53
Belanja Modal	1.190.256.536	1.066.113.143	89,57
Belanja Tak Terduga	103.319.482	93.794.421	90,26
Transfer Bantuan Keuangan	2.098.646	2.098.645	100,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>645.333.377</b>	<b>645.333.377</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	645.333.377	645.333.377	100,00
Pengeluaran Daerah	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.10 laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Samarinda tahun 2020 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp2.592.819.129 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.872.836.034 atau 110,80%, anggaran belanja sebesar Rp3.238.152.506 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp2.978.185.111 atau 91,97%, anggaran pembiayaan sebesar

Rp645.333.377 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp645.333.377 atau 100,00%. Pada anggaran tahun 2020 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### 4.2.2 Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang dianggarkan) pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Berikut ini tabel perhitungan efektivitas pendapatan daerah Kota Samarinda.

**Tabel 4.11 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>Pendapatan</b>	<b>2.363.197.387</b>	<b>2.288.550.678</b>	<b>74.646.709</b>	<b>96,84</b>
Pendapatan Asli Daerah	507.247.746	519.640.806	(12.393.049)	102,44
Pendapatan Transfer	1.854.941.640	1.768.909.871	86.031.769	95,36
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.008.000	0	1.008.000	0
<b>Belanja</b>	<b>2.541.344.738</b>	<b>2.283.031.685</b>	<b>258.313.053</b>	<b>89,84</b>
Belanja Operasi	1.760.542.464	1.578.033.675	182.508.789	89,63
Belanja Modal	777.802.273	702.034.572	75.767.700	90,26
Belanja Tak Terduga	3.000.000	2.963.437	36.562	98,78
Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0	0
<b>Pembiayaan</b>	<b>178.147.350</b>	<b>179.156.846</b>	<b>(1.009.496)</b>	<b>100,57</b>
Penerimaan Daerah	179.155.350	179.156.846	(1.496)	100,00
Pengeluaran Daerah	1.008.000	0	1.008.000	0
<b>Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan</b>				<b>71,13</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

##### A. Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun 2017

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{2.288.550.678}{2.363.197.387} \times 100\% \\ &= 96,84\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan pada Tabel 4.11 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif 96,84%. Itu artinya pemerintah Kota Samarinda efektif dalam merealisasikan anggarannya.

**Tabel 4.12 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>Pendapatan</b>	<b>2.542.658.336</b>	<b>2.700.306.264</b>	<b>(157.647.927)</b>	<b>106,20</b>
Pendapatan Asli Daerah	445.353.498	498.888.664	(53.535.165)	112,02
Pendapatan Transfer	1.974.656.073	2.119.600.334	(144.944.261)	107,34
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	122.648.764	81.757.265	40.981.499	66,66
<b>Belanja</b>	<b>2.726.534.176</b>	<b>2.517.192.820</b>	<b>209.341.355</b>	<b>92,32</b>
Belanja Operasi	1.810.861.869	1.697.076.492	133.785.377	93,72
Belanja Modal	910.768.831	817.179.025	93.589.806	89,72
Belanja Tak Terduga	3.000.000	1.003.828	1.996.171	34,46
Transfer Bantuan Keuangan	1.903.474	1.903.474	0	100,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>183.875.840</b>	<b>183.883.840</b>	<b>- 7.999</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	184.675.840	184.675.840	0	100,00
Pengeluaran Daerah	800.000	792.000	8.000	99,00
<b>Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan</b>				<b>88,65</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

#### B. Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun 2018

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{2.700.306.264}{2.542.658.336} \times 100\% \\ &= 106,20\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan pada Tabel 4.12 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih besar daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif 106,20%. Itu artinya pemerintah Kota Samarinda sangat efektif dalam merealisasikan anggarannya.

**Tabel 4.13 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>Pendapatan</b>	<b>3.064.327.330</b>	<b>3.345.420.495</b>	<b>(281.093.165)</b>	<b>109,18</b>
Pendapatan Asli Daerah	500.991.118	560.444.857	(59.453.739)	111,87
Pendapatan Transfer	2.463.926.211	2.702.425.917	(238.499.706)	109,68
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	99.410.000	82.649.720	16.760.280	83,14
<b>Belanja</b>	<b>3.431.324.613</b>	<b>3.067.184.401</b>	<b>364.140.212</b>	<b>89,38</b>
Belanja Operasi	2.063.362.673	1.856.744.865	206.617.808	89,99
Belanja Modal	1.360.993.408	1.206.777.043	154.216.365	88,67
Belanja Tak Terduga	5.000.000	1.693.360	3.306.639	33,88
Transfer Bantuan Keuangan	1.968.531	1.968.531	0	100,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>366.997.283</b>	<b>366.997.283</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	366.997.283	366.997.283	0	100,00
Pengeluaran Daerah	0	0	0	0
<b>Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan</b>				<b>75,24</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

C. Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{3.345.420.495}{3.064.327.330} \times 100\% \\ &= 109,18\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan pada Tabel 4.13 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih besar daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif 109,18%. Itu artinya pemerintah Kota Samarinda sangat efektif dalam merealisasikan anggarannya.

**Tabel 4.14 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>Pendapatan</b>	<b>2.592.819.129</b>	<b>2.872.836.034</b>	<b>(280.016.905)</b>	<b>110,80</b>
Pendapatan Asli Daerah	392.727.879	485.189.493	(92.461.614)	123,54
Pendapatan Transfer	2.097.155.527	2.291.345.796	(194.190.268)	109,26
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	102.935.723	96.300.745	6.634.978	93,55
<b>Belanja</b>	<b>3.238.152.506</b>	<b>2.978.185.111</b>	<b>259.967.395</b>	<b>91,97</b>
Belanja Operasi	1.941.877.842	1.816.178.901	125.698.941	93,57
Belanja Modal	1.190.256.536	1.066.113.143	124.143.393	89,57

Disambung Ke Halaman Berikutnya

**Tabel 4.14 Sambungan**

Belanja Tak Terduga	103.319.482	93.794.421	9.525.060	90,26
Transfer Bantuan Keuangan	2.098.646	2.098.645	1	100,00
<b>Pembiayaan</b>	<b>645.333.377</b>	<b>645.333.377</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Daerah	645.333.377	645.333.377	0	100,00
Pengeluaran Daerah	0	0	0	0
<b>Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan</b>				<b>83,17</b>

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

#### D. Efektif Pendapatan Daerah Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{2.872.836.034}{2.592.819.129} \times 100\% \\ &= 110,80\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan Pada Tabel 4.14 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif 110,80%. Itu artinya pemerintah Kota Samarinda sangat efektif dalam merealisasikan anggarannya.

**Tabel 4.15 Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

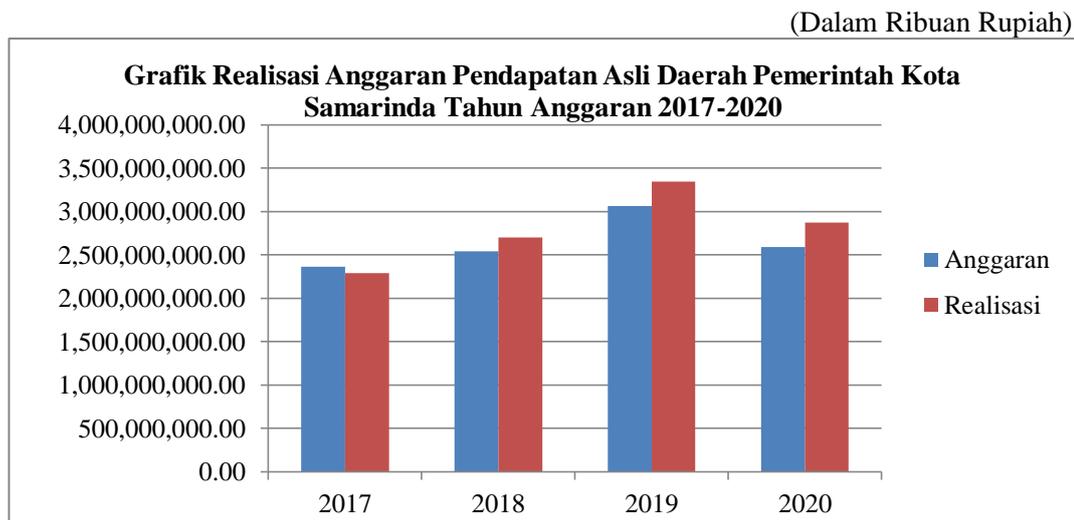
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektivitas
2017	2.363.197.387	2.288.550.678	96,84	Efektif
2018	2.542.658.336	2.700.306.264	106,20	Sangat Efektif
2019	3.064.327.330	3.345.420.495	109,18	Sangat Efektif
2020	2.592.819.129	2.872.836.034	110,80	Sangat Efektif

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.15 diketahui bahwa rasio efektif pendapatan pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020 sudah tercapai target yang diinginkan. Dalam kategori sangat efektif dalam merealisasikan anggaran tahun 2017 sebesar 96,84% tahun 2018 sebesar 106,20% tahun 2019 sebesar 109,18%, dan tahun 2020 sebesar 110,80 sangat efektif, karena mencapai angka diatas 100%. Tingkat

analisis efektivitas yang tertinggi adalah pada tahun anggaran 2020 mencapai 110,80%. Hal ini karena realisasi anggaran pendapatan lebih besar dari target anggaran pendapatan.



**Gambar 4.2 Grafik Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020**

Dari grafik realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Samarinda tahun 2017-2020. Realisasi anggaran pendapatan lebih besar daripada jumlah yang dianggarkan. Terlihat realisasi anggaran mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017-2020. Anggaran pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp2.363.197.387 tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.542.658.336 sedangkan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.064.327.330 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.592.819.129.

#### 4.2.3 Perhitungan dan Analisis Rasio Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

##### A. Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2017

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Efisiensi Belanja} &= \frac{2.283.031.685}{2.541.344.738} \times 100\% \\
 &= 89,84\% \\
 2) \text{ Belanja Operasi} &= \frac{1.578.033.675}{1.760.542.464} \times 100\% \\
 &= 89,63\% \\
 3) \text{ Belanja Modal} &= \frac{702.034.572}{777.802.273} \times 100\% \\
 &= 90,26\% \\
 4) \text{ Belanja Tak Terduga} &= \frac{2.963.437}{3.000.000} \times 100\% \\
 &= 98,78\% \\
 5) \text{ Transfer} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= 0\% \\
 6) \text{ Pembiayaan} &= \frac{179.156.846}{178.147.350} \times 100\% \\
 &= 100,57\% \\
 7) \text{ Penerimaan Daerah} &= \frac{179.156.846}{179.155.350} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 8) \text{ Pengeluaran Daerah} &= \frac{0}{1.008.000} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efisien diatas menunjukan efisien belanja sebesar 89,84% belanja operasi 89,63% belanja modal 90,26% belanja tak terduga 98,78% transfer 0% pembiayaan 100,57% penerimaan daerah 100,00% dan

pengeluaran daerah 0 %. Jadi rata-rata efisien belanja sebesar 71,13% sehingga rasio efisien belanja adalah  $100\% - 71,13\% = 28,87\%$ . Sehingga pemerintah Kota Samarinda dikatakan mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien ditahun 2017 berdasarkan alat ukur standar efisien belanja.

#### B. Efisiensi Belanja Daerah 2018

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 1) \text{ Efisiensi Belanja} &= \frac{2.517.192.820}{2.726.534.176} \times 100\% \\ &= 92,32\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ Belanja Operasi} &= \frac{1.697.076.492}{1.810.861.869} \times 100\% \\ &= 93,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Belanja Modal} &= \frac{817.179.025}{910.768.831} \times 100\% \\ &= 89,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \text{ Belanja Tak Terduga} &= \frac{1.003.828}{3.000.000} \times 100\% \\ &= 34,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \text{ Transfer} &= \frac{1.903.474}{1.903.474} \times 100\% \\ &= 100,00\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \text{ Pembiayaan} &= \frac{183.883.840}{183.875.840} \times 100\% \\ &= 10,00\% \end{aligned}$$

$$7) \text{ Penerimaan Daerah} = \frac{184.675.840}{184.675.840} \times 100\%$$

$$= 100,00\%$$

$$8) \text{ Pengeluaran Daerah} = \frac{792.000}{800.000} \times 100\%$$

$$= 99,00\%$$

Dari perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan efisien belanja sebesar 92,32% belanja operasi 93,72% belanja modal 89,72% belanja tak terduga 34,46% transfer 100,00% pembiayaan 100,00% penerimaan daerah 100,00% dan pengeluaran daerah 99,00%. Jadi rata-rata efisien belanja sebesar 88,65% sehingga rasio efisien belanja adalah  $100\% - 88,65\% = 11,35\%$ . Sehingga pemerintah Kota Samarinda dikatakan mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien ditahun 2018 berdasarkan alat ukur standar efisien belanja.

### C. Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2019

$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$
---

$$1) \text{ Efisiensi Belanja} = \frac{3.067.184.401}{3.431.324.613} \times 100\%$$

$$= 89,38\%$$

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{1.856.744.865}{2.063.362.673} \times 100\%$$

$$= 89,99\%$$

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{1.206.777.043}{1.360.993.408} \times 100\%$$

$$= 88,67\%$$

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{1.693.360}{5.000.000} \times 100\%$$

$$= 33,88\%$$

$$\begin{aligned}
 5) \text{ Transfer} &= \frac{1.968.531}{1.968.531} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 6) \text{ Pembiayaan} &= \frac{366.997.283}{366.997.283} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 7) \text{ Penerimaan Daerah} &= \frac{366.997.283}{366.997.283} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 8) \text{ Pengeluaran Daerah} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan efisien belanja sebesar 89,38% belanja operasi 89,99% belanja modal 88,67% belanja tak terduga 33,88% transfer 100,00% pembiayaan 100,00% penerimaan daerah 100,00% dan pengeluaran daerah 0 %. Jadi rata-rata efisien belanja sebesar 75,24% sehingga rasio efisien belanja adalah  $100\% - 75,24\% = 24,76\%$ . Sehingga pemerintah Kota Samarinda dikatakan mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien ditahun 2019 berdasarkan alat ukur standar efisien belanja.

#### D. Efisien Belanja Daerah Tahun 2020

$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$
---

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Efisien Belanja} &= \frac{2.978.185.111}{3.238.152.506} \times 100\% \\
 &= 91,97\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \text{ Belanja Operasi} &= \frac{1.816.178.901}{1.941.877.842} \times 100\% \\
 &= 93,57\% \\
 3) \text{ Belanja Modal} &= \frac{1.066.113.143}{1.190.256.536} \times 100\% \\
 &= 89,57\% \\
 4) \text{ Belanja Tak Terduga} &= \frac{93.794.421}{103.319.482} \times 100\% \\
 &= 90,26\% \\
 5) \text{ Transfer} &= \frac{2.098.645}{2.098.646} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 6) \text{ Pembiayaan} &= \frac{645.333.377}{645.333.377} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 7) \text{ Penerimaan Daerah} &= \frac{645.333.377}{645.333.377} \times 100\% \\
 &= 100,00\% \\
 8) \text{ Pengeluaran Daerah} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan efisien belanja sebesar 91,97% belanja operasi 93,57% belanja modal 89,57% belanja tak terduga 90,26% transfer 100,00% pembiayaan 100,00% penerimaan daerah 100,00% dan pengeluaran daerah 0 %. Jadi rata-rata efisien belanja sebesar 83,17%, sehingga rasio efisien belanja adalah  $100\% - 83,17\% = 16,83\%$ . Sehingga Pemerintah Kota

Samarinda dikatakan mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien ditahun 2020 berdasarkan alat ukur standar efisien belanja.

**Tabel 4.16 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rata-Rata	Persentase (%)	Analisis Efisiensi
2017	2.283.031.685	2.541.344.738	71,13	28,87	Sangat Efisien
2018	2.515.289.345	2.724.630.701	88,65	11,35	Sangat Efisien
2019	3.065.215.869	3.429.356.081	75,24	24,76	Sangat Efisien
2020	2.976.086.465	3.236.053.860	83,17	16,83	Sangat Efisien

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

Dari Tabel 4.16 laporan efisiensi belanja pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020 sangat efisien dalam merealisasikan belanja daerah karena dapat berhemat lebih besar dari rasio efisien sebesar 28,87% tahun 2017 11,35% tahun 2018 24,76% tahun 2019 dan 16,83% tahun 2020.

(Dalam Ribuan Rupiah)



**Gambar 4.3 Grafik Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017-2020**

Dari grafik anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda tahun 2017-2020, realisasi anggaran belanja lebih besar dari anggaran belanja. Jumlah realisasi anggaran belanja tahun 2017-2019, kecuali tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi anggaran belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp2.283.031.685 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.289.345 dan

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.289.345 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.976.086.465.

### **4.3 Pembahasan**

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2012).

#### **4.3.1 Rasio Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan anggaran pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan realisasi anggaran pendapatan yang semakin baik. Adapun perhitungan efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan angka-angka pada laporan realisasi anggaran pendapatan selama empat tahun yaitu pada tahun 2017-2020

Berdasarkan perhitungan kinerja keuangan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda pada tabel 4.15 dengan rasio efektivitas tampak bahwa selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020, persentase rasio efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2018 rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 9,36%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,98% sedangkan di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,62%. Berdasarkan hasil dari penilaian

kinerja keuangan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda pada rasio efektivitas tersebut secara umum selama 4 tahun terakhir dapat dikatakan sangat efektif karena:

Berdasarkan hasil dari rasio efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2017 pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas senilai 96,84%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2017 anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda dinilai efektif, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil dari rasio efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2018 pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas senilai 106,20%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018 anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efektif, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil dari rasio efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2019 pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas senilai 109,18%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2019 anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efektif, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil dari rasio efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2020 pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa rasio

efektivitas senilai 110,80%. hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2020 anggaran pendapatan Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efektif, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan sangat baik.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Daling, 2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah efektif hal ini terlihat bahwa jumlah realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran dengan total rata-rata sebesar 97,71%.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Aisah, 2019) hasil penelitian Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016. analisis rasio efektivitas yaitu, efektif tidak melebihi anggaran.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Anastasia et al., 2015) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektif penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Fatmala, 2019) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) RasioEfektivitas anggaran dan belanja Kantor Camat Pakue tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan kinerja setiap tahun mengalami peningkatan (Efektif).

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Rukayah et al., 2017) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Hasil Penelitian rasio efektifnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

#### **4.3.2 Rasio Efisien Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2017-2020**

Rasio efisiensi yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap realisasi belanja. Semakin rendah rasio efisiensi menggambarkan realisasi anggaran belanja yang semakin baik. Adapun perhitungan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan angka-angka pada laporan realisasi anggaran selama empat tahun yaitu pada tahun 2017-2020.

Berdasarkan perhitungan kinerja keuangan anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda dengan rasio efisiensi pada tabel 4.16 tampak bahwa selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020 persentase rasio efisiensi Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan, pada tahun 2017 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 17,52% di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,41%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 7,83%. Berdasarkan hasil dari penilaian kinerja keuangan pada rasio efisiensi tersebut, secara umum selama 4 tahun terakhir dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda pada rasio efisiensi dapat dikategorikan sangat efisien karena:

Berdasarkan hasil dari rasio efisiensi besarnya anggaran belanja terhadap realisasi tahun 2017 pada tabel 4.16 dapat diketahui rasio efisiensi senilai 28,87%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efisien, karena besarnya belanja diimbangi dengan capaian target belanja yang sangat efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

Berdasarkan hasil dari rasio efisiensi besarnya anggaran belanja terhadap realisasi tahun 2018 pada tabel 4.16 dapat diketahui rasio efisiensi senilai 11,35%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efisien, karena besarnya belanja diimbangi dengan capaian target belanja yang sangat efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

Berdasarkan hasil dari rasio efisiensi besarnya anggaran belanja terhadap realisasi tahun 2019 pada tabel 4.16 dapat diketahui rasio efisiensi senilai 24,76%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efisien, karena besarnya belanja diimbangi dengan capaian target belanja yang sangat efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

Berdasarkan hasil dari rasio efisiensi besarnya anggaran belanja terhadap realisasi tahun 2020 pada tabel 4.16 dapat diketahui rasio efisiensi senilai

16,83%, hal ini mengidentifikasi bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat efisien, karena besarnya belanja diimbangi dengan capaian target belanja yang sangat efektif. Hal ini terjadi karena realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

Dengan demikian rasio keuangan daerah Kota Samarinda dikatakan sangat efisien pada tahun anggaran 2017-2020 dengan total 2017 sebesar 71,13%, 2018 sebesar 88,65%, 2019 sebesar 75,24%, dan 2020 sebesar 83,17%, dan kinerja belanja pemerintah Kota Samarinda dikatakan sangat efisien pada tahun 2017-2020 dengan angka tahun 2017 sebesar 28,87%, 2018 sebesar 11,35%, 2019 sebesar 24,76%, dan 2020 sebesar 16,83%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aisah, 2019) Hasil penelitian Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016 menunjukkan bahwa analisis efisiensi belanja pemerintah Kota Samarinda mampu menghemat anggaran belanja dengan baik dan efisiensi.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Saputra et al., 2016) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisiensi.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Fatmala, 2020) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil Penelitian Rasio

Efisiensi Kantor Camat Pakue tahun 2017-2019 mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan efisiensi.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Elim et al., 2015) Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. Dari hasil perhitungan rasio efisien belanja, maka dapat dilihat T.A 2013-2014 pemerintah kota kotamobagu dapat melakukan penghematan anggaran sebesar 12,73%.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Daling, 2013) Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil Penelitian kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA Surplus.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Anastasia et al., 2015) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat kriteria efisien anggaran dan belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan pengguna anggaran belanja yang terlalu berlebihan.

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Rukayah et al., 2017) Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Hasil penelitian pada rasio efisiennya dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiennya diperoleh sebesar 92% termasuk kriteria kurang efisien.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis data pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020 sudah mencapai kategori sangat efektif karena berada pada predikat  $>100\%$ , hal ini terlihat dari lebih besarnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2017-2020 yaitu tahun 2017 sebesar 96,84% tahun 2018 sebesar 106,20% tahun 2019 sebesar 109,18%, dan tahun 2020 sebesar 110,80%.
2. Tingkat efisien belanja dari pemerintah daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2017-2020, pemerintah Kota Samarinda dinilai sangat mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien karena berada pada predikat  $<60\%$ , hal ini terlihat dari adanya angka kinerja anggaran belanja tahun 2017 sebesar 28,87%, 2018 sebesar 11,35%, 2019 sebesar 24,76%, dan 2020 sebesar 16,83%

#### **5.2 Saran**

1. Diharapkan pemerintah daerah Kota Samarinda berupaya untuk lebih mengembangkan potensi baru mengikuti perkembangan zaman di daerah pemerintah Kota Samarinda karena sangat bermanfaat untuk pembangunan, sehingga menurunkan ketergantungan pada pemerintah pusat dan akan

meningkatkan kemandirian daerah Kota Samarinda. Serta mempertahankan kinerja keuangan yang sudah baik.

2. Sedangkan pada efisien belanja pemerintah Kota Samarinda disarankan tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga selalu tercapai target efisien belanja dan tidak bergantung pada belanja transfer pemerintah.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian secara lebih rinci dalam menganalisis data sehingga hasil penelitiannya jauh lebih andal dan akurat dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, S. (2019). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, (Vol. 3, Issue 4). Universitas Mulawarman.
- Alodia, M. (2016). Analisis Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Anastasia., Palilingan, F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol.3, No.1.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 82–89.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, *Jurnal EMBA*, 3(1), 534-541.
- Elim, I., Al Makka., Herry., & David, P. E. S. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 324–333.
- Erlina. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.
- Fatmala, E. (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*. 1–9.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Ed. 1). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta.

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rukayah., Nugrahin, K., & Raden, I A. (2017), Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.2.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 136–145.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Yuliastati. (2019). Urgensi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terhadap perencanaan pembangunan daerah. *E Jurnal Katalogis*, 5(4), 160–171.

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Dahlia Komp. Perkantoran Balaikota Telp/Fax (0541) 733926 – 733986  
S A M A R I N D A

Kode Pos 75121

Samarinda, 21 Maret 2022

Nomor : 070/ /300.02

Kepada,

Sifat : Biasa

Yth. Kepala Bidang Akuntansi  
BPKAD Kota Samarinda  
di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Samarinda

Menindak lanjuti Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda Nomor : 070/0263/300.06 tanggal 07 Maret 2022 Prihal Rekomendasi Penelitian dari Saudara/i :

Nama : **Rifky Nur Fasha**  
NIM. : 1601035230  
Program Studi : Akuntansi  
Jabatan/Tempat : Mahasiswa / Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Tempat Penelitian : BPKAD Kota Samarinda  
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan  
Untuk : 1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi : '**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda 2017 – 2020**'

Bersama ini dimohon kepada Saudara/i, selama mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan penelitian, untuk dapat memberikan informasi data – data yang diperlukan guna mendukung penelitian sebagaimana dimaksud.

Khusus kepada Peneliti agar menyampaikan 1 (satu) Exemplar hasil penelitian kepada Kepala BPKAD Kota Samarinda Cq. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Samarinda.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**  
 (Audited)

URAIAN	ANGGARAN 2016	2016	(%)	2015
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 290,510,000,000.00	Rp 256,130,052,909.60	88.17	Rp 244,079,216,597.34
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 79,724,248,000.00	Rp 58,591,942,122.00	73.49	Rp 61,824,059,131.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 5,297,911,057.00	Rp 4,359,741,392.02	82.29	Rp 4,776,018,600.80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 93,838,901,746.39	Rp 72,322,556,867.35	77.07	Rp 109,066,493,311.87
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 469,371,060,803.39</b>	<b>Rp 391,404,293,290.97</b>	<b>83.39</b>	<b>Rp 419,745,787,641.01</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 1,598,279,916,066.00	Rp 1,622,965,303,098.00	101.54	Rp 1,750,968,025,483.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp 125,345,336,623.00	Rp 117,725,133,664.00	93.92	Rp 98,115,346,650.00
Dana Alokasi Umum	Rp 507,592,605,043.00	Rp 578,267,538,947.00	113.92	Rp 756,500,087,833.00
Dana Alokasi Khusus	Rp 665,150,055,000.00	Rp 665,150,055,000.00	100.00	Rp 590,233,541,000.00
Dana Penyesuaian	Rp 295,191,919,400.00	Rp 256,822,575,487.00	87.00	Rp 97,568,524,000.00
	Rp 5,000,000,000.00	Rp 5,000,000,000.00	100.00	Rp 208,550,526,000.00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 483,808,262,000.00	Rp 423,257,053,000.00	87.48	Rp 688,628,384,800.00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	Rp 249,075,179,000.00	Rp 186,523,970,000.00	75.69	Rp 314,849,684,800.00
	Rp 234,733,083,000.00	Rp 234,733,083,000.00	100.00	Rp 373,778,700,000.00
<b>Jumlah Pendapatan transfer</b>	<b>Rp 2,082,088,178,066.00</b>	<b>Rp 2,046,222,356,098.00</b>	<b>98.28</b>	<b>Rp 2,439,596,410,283.00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	Rp 62,402,689,965.88	Rp -	-	Rp 14,091,750.00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>Rp 62,402,689,965.88</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>	<b>Rp 14,091,750.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 2,613,861,928,835.27</b>	<b>Rp 2,437,626,649,388.97</b>	<b>93.26</b>	<b>Rp 2,859,356,289,674.01</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	Rp 1,139,637,468,920.90	Rp 1,016,852,128,034.57	89.23	Rp 1,039,470,831,796.07
Belanja Barang dan Jasa	Rp 694,710,060,397.34	Rp 584,913,260,321.64	84.20	Rp 813,270,571,725.38
Belanja Bunga	Rp -	Rp -	-	Rp 9,906,889.91
Belanja Hibah	Rp 35,550,825,905.00	Rp 31,691,725,000.00	89.14	Rp 173,704,986,100.00
Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-	Rp 680,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 1,765,940,085.00	Rp 1,659,592,935.00	93.98	Rp -
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>Rp 1,871,664,295,308.24</b>	<b>Rp 1,635,116,706,291.21</b>	<b>87.36</b>	<b>Rp 2,027,136,296,511.36</b>

U R A I A N	ANGGARAN 2016	2016	(%)	2015
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah	Rp 13,293,796,857.00	Rp 7,750,309,710.00	58.30	Rp 39,494,693,168.00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 44,869,790,233.04	Rp 36,543,957,650.43	81.44	Rp 51,091,443,082.57
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 136,516,081,247.00	Rp 124,470,965,823.00	91.18	Rp 209,887,813,086.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 535,824,612,225.00	Rp 507,731,165,309.00	94.76	Rp 887,406,010,787.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 3,038,804,082.00	Rp 2,624,206,372.00	86.36	Rp 6,149,323,448.00
Belanja Modal Dana Bos	Rp 16,709,459,025.00	Rp 16,616,571,855.00	99.44	Rp 15,579,020,877.00
Jumlah Belanja Modal	Rp 750,252,543,669.04	Rp 695,737,176,719.43	92.73	Rp 1,209,608,304,448.57
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	Rp 3,000,000,000.00	Rp 1,075,015,572.00	35.83	Rp 796,140,318.20
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp 3,000,000,000.00	Rp 1,075,015,572.00	35.83	Rp 796,140,318.20
<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp 2,624,916,838,977.28	Rp 2,331,928,898,582.64	88.84	Rp 3,237,540,741,278.13
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	Rp -	Rp -	-	Rp 1,020,379,815.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp -	Rp -	-	Rp 1,020,379,815.00
<i>Surplus/(Defisit)</i>	Rp (11,054,910,142.01)	Rp 105,697,750,806.33	(956.12)	Rp (379,204,831,419.12)
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	Rp 73,457,600,107.89	Rp 73,457,600,107.89	100.00	Rp 485,536,417,492.48
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	-	Rp -
Jumlah Penerimaan	Rp 73,457,600,107.89	Rp 73,457,600,107.89	100.00	Rp 485,536,417,492.48
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 62,402,689,965.88	Rp -	-	Rp 32,707,173,820.00
Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	-	Rp 166,812,145.47
Jumlah Pengeluaran	Rp 62,402,689,965.88	Rp -	-	Rp 32,873,985,965.47
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	Rp 11,054,910,142.01	Rp 73,457,600,107.89	664.48	Rp 452,662,431,527.01
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	Rp 0.00	Rp 179,155,350,914.22	-	Rp 73,457,600,107.89

Samarinda, Mei 2017  
Walikota Samarinda

  
H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2017	SALDO AUDITED 2017	(%)	SALDO AUDITED 2016
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	262.781.200.000,00	298.972.840.769,93	113,77	256.130.052.909,60
Pendapatan Retribusi Daerah	67.832.877.000,00	52.123.941.557,00	76,84	58.591.942.122,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	5.057.498.908,46	72,25	4.359.741.392,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	169.633.669.809,00	163.486.525.572,43	96,38	72.322.556.867,35
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	507.247.746.809,00	519.640.806.807,82	102,44	391.404.293.290,97
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>				
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	452.752.904.929,00	359.925.240.273,00	79,50	695.992.672.611,00
Dana Bagi Hasil Pajak	127.709.284.600,00	100.730.525.248,00	78,87	117.725.133.664,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	325.043.620.329,00	259.194.715.025,00	79,74	578.267.538.947,00
Dana Alokasi Umum	653.465.507.000,00	653.465.507.000,00	100,00	665.150.055.000,00
Dana Alokasi Umum	653.465.507.000,00	653.465.507.000,00	100,00	665.150.055.000,00
Dana Alokasi Khusus	268.378.150.000,00	238.686.091.599,00	88,94	256.822.575.487,00
Dana Alokasi Khusus	268.378.150.000,00	238.686.091.599,00	88,94	256.822.575.487,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.374.596.561.929,00	1.252.076.838.872,00	91,09	1.617.965.303.098,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH- LAINNYA</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	302.225.427.000,00	338.713.381.000,00	112,07	188.523.970.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	302.225.427.000,00	338.713.381.000,00	112,07	188.523.970.000,00
<b>BANTUAN KEUANGAN</b>				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	178.119.651.739,00	178.119.651.739,00	100,00	234.733.083.000,00
Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	178.119.651.739,00	178.119.651.739,00	100,00	234.733.083.000,00
Jumlah Pendapatan transfer	1.854.941.640.668,00	1.768.909.871.611,00	95,36	2.046.222.356.098,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.363.197.387.477,00</b>	<b>2.288.550.678.418,82</b>	<b>96,84</b>	<b>2.437.626.649.388,97</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	1.011.594.994.553,00	931.254.208.717,18	92,06	1.016.852.128.034,57
Belanja Barang dan Jasa	730.264.446.302,00	618.903.996.820,58	84,75	584.913.260.321,64
Belanja Hibah	17.289.864.100,00	26.678.063.049,00	154,30	31.691.725.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.393.159.950,00	1.197.406.665,00	85,95	1.659.592.935,00
Jumlah Belanja Operasi	1.760.542.464.905,00	1.578.033.675.251,76	89,63	1.638.116.706.291,21

URAIAN	ANGGARAN 2017	SALDO AUDITED 2017	(%)	SALDO AUDITED 2016
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah	10.421.287.500,00	6.424.204.345,00	61,65	7.750.309.710,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.448.468.140,00	18.343.774.741,00	75,03	36.543.957.650,43
Belanja Gedung dan Bangunan	203.393.834.986,00	182.569.370.905,00	89,76	124.470.965.823,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	530.176.365.110,00	472.609.691.881,00	89,14	507.731.165.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	607.252.750,00	573.010.300,00	94,36	2.624.206.372,00
Belanja Modal Dana Bos	8.755.065.000,00	21.514.520.326,19	245,74	16.616.571.855,00
Jumlah Belanja Modal	777.802.273.486,00	702.034.572.498,19	90,26	695.737.176.719,43
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.541.344.738.391,00</b>	<b>2.283.031.685.052,45</b>	<b>89,84</b>	<b>2.331.928.898.582,64</b>
<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>(178.147.350.914,00)</i>	<i>5.518.993.366,37</i>	<i>(3,10)</i>	<i>105.697.750.806,33</i>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	73.457.600.107,89
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	73.457.600.107,89
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>178.147.350.914,00</b>	<b>179.156.846.880,22</b>	<b>100,57</b>	<b>73.457.600.107,89</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>184.675.840.246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>179.155.350.914,22</b>

Samarinda, Mei 2018  
Pjs. Walikota Samarinda

  
DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	309.979.500.000,00	352.827.149.153,44	113,82	298.972.840.769,93
4	Pendapatan Retribusi Daerah	71.314.172.500,00	48.480.939.558,00	79,07	52.123.941.557,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.979.756.081,00	11.707.898.396,97	97,73	5.057.498.908,46
6	Lain-lain PAD Yang Sah	62.080.069.809,00	85.872.677.051,55	138,33	163.486.525.572,43
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>445.353.498.390,00</b>	<b>498.888.664.159,96</b>	<b>112,02</b>	<b>519.640.806.807,82</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
9	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>				
10	Bagi Hasil Pajak	120.239.317.000,00	93.507.456.251,00	77,77	100.730.525.248,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	344.802.218.687,00	523.611.508.712,00	151,86	259.194.715.025,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00	100,00	653.465.507.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	242.307.491.000,00	234.160.199.197,00	96,64	238.686.091.599,00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.366.671.561.687,00</b>	<b>1.510.601.699.160,00</b>	<b>110,53</b>	<b>1.252.076.838.872,00</b>
15	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
16	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	399.501.058.000,00	400.575.181.938,00	100,27	338.713.381.000,00
20	<b>Bantuan Keuangan</b>				
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	208.483.453.739,00	208.483.453.739,00	100,00	178.119.651.739,00
22	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>607.984.511.739,00</b>	<b>609.058.635.677,00</b>	<b>100,18</b>	<b>516.833.032.739,00</b>
23	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>1.974.656.073.426,00</b>	<b>2.119.660.334.837,00</b>	<b>107,34</b>	<b>1.768.909.871.611,00</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
25	Pendapatan Hibah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81	66,66	0,00
26	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81	66,66	0,00
27	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.542.658.336.409,00</b>	<b>2.700.306.264.071,77</b>	<b>106,20</b>	<b>2.288.550.678.418,82</b>

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
28	<b>BELANJA</b>				
29	<b>BELANJA OPERASI</b>				
30	Belanja Pegawai	1.307.872.909.486,00	1.214.251.946.146,00	92,84	931.254.208.717,18
31	Belanja Barang dan Jasa	475.204.310.273,00	456.353.896.124,31	96,03	618.903.996.820,58
32	Belanja Hibah	27.784.650.000,00	26.470.650.000,00	95,27	26.678.063.049,00
33	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.810.861.869.759,00</b>	<b>1.697.076.492.270,31</b>	<b>93,72</b>	<b>1.576.836.268.586,76</b>
34	<b>BELANJA MODAL</b>				
35	Belanja Modal Tanah	21.311.111.150,00	20.326.281.017,00	95,38	6.424.204.345,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.677.075.063,00	61.199.821.105,00	47,93	18.343.774.741,00
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.881.819.712,00	156.394.852.365,00	93,72	182.569.370.905,00
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	587.770.713.990,00	550.373.428.011,28	93,64	472.609.691.881,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	822.470.500,00	782.190.470,00	95,10	573.010.300,00
40	Belanja Modal Dana BOS	6.305.641.529,00	28.102.452.648,79	445,67	21.514.520.326,19
41	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>910.768.831.944,00</b>	<b>817.179.025.617,07</b>	<b>89,72</b>	<b>702.034.572.498,19</b>
42	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
43	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.033.828.109,00	34,46	2.963.437.302,50
44	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.033.828.109,00</b>	<b>34,46</b>	<b>2.963.437.302,50</b>
45	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.724.630.701.703,00</b>	<b>2.515.289.345.996,38</b>	<b>92,32</b>	<b>2.281.834.278.387,45</b>
46	<b>TRANSFER</b>				
47	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
48	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.903.474.953,00	1.903.474.953,00	100,00	1.197.406.665,00
49	<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa</b>	<b>1.903.474.953,00</b>	<b>1.903.474.953,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.197.406.665,00</b>
50	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(183.875.840.247,00)</b>	<b>183.113.443.122,39</b>	<b>(99,59)</b>	<b>5.518.993.366,37</b>
51	<b>PEMBIAYAAN</b>				
52	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
53	Penggunaan SILPA	184.675.840.247,00	184.675.840.246,59	100,00	179.156.846.880,22
54	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>184.675.840.247,00</b>	<b>184.675.840.246,59</b>	<b>100,00</b>	<b>179.156.846.880,22</b>
55	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	800.000.000,00	792.000.000,00	99,00	0,00
57	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>792.000.000,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
58	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>183.875.840.247,00</b>	<b>183.883.840.246,59</b>	<b>100,00</b>	<b>179.156.846.880,22</b>
59	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>	<b>0,00</b>	<b>184.675.840.246,59</b>

Samarinda, Mei 2019  
WALIKOTA SAMARINDA

  
H. SYAHARIE JA'ANG



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

D.	URAIAN	ANGGARAN 2019	AUDITED 2019	(%)	AUDITED 2018
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	332.216.400.000,00	369.978.459.595,73	111,37	352.827.149.153,44
	Pendapatan Retribusi Daerah	53.370.887.373,22	49.520.199.223,00	92,79	48.480.939.558,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.075.830.450,00	12.482.957.095,38	95,47	11.707.898.396,97
	Lain-lain PAD Yang Sah	102.328.000.500,00	128.463.241.448,69	125,54	85.872.677.051,55
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>500.991.118.323,22</b>	<b>560.444.857.362,80</b>	<b>111,87</b>	<b>498.888.664.159,96</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
	Bagi Hasil Pajak	70.037.267.200,00	70.167.651.448,00	100,19	93.507.456.251,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	477.040.662.400,00	770.820.147.637,00	161,58	523.611.508.712,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	717.525.738.000,00	707.113.978.000,00	98,55	659.322.535.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	268.936.655.140,00	256.326.317.367,00	95,31	234.160.199.197,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.533.540.322.740,00</b>	<b>1.804.428.094.452,00</b>	<b>117,66</b>	<b>1.510.601.699.160,00</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
	Dana Penyesuaian	30.087.063.000,00	30.087.063.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>30.087.063.000,00</b>	<b>30.087.063.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	424.695.427.885,00	392.307.362.271,00	92,37	400.575.181.938,00
	Bantuan Keuangan				
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	475.603.398.182,78	475.603.398.182,78	100,00	208.483.453.739,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>900.298.826.067,78</b>	<b>867.910.760.453,78</b>	<b>96,40</b>	<b>609.058.635.677,00</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>2.463.926.211.807,78</b>	<b>2.702.425.917.905,78</b>	<b>109,68</b>	<b>2.119.660.334.837,00</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	99.410.000.000,00	82.649.720.000,00	83,14	81.757.265.074,81
	<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>99.410.000.000,00</b>	<b>82.649.720.000,00</b>	<b>83,14</b>	<b>81.757.265.074,81</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.064.327.330.131,00</b>	<b>3.345.520.495.268,58</b>	<b>109,18</b>	<b>2.700.306.264.071,77</b>

URAIAN	ANGGARAN 2019	AUDITED 2019	(%)	AUDITED 2018
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	1.401.736.650.655,00	1.268.404.148.597,19	90,49	1.214.251.946.146,00
Belanja Barang dan Jasa	633.257.680.769,00	564.254.051.911,44	89,10	456.353.896.124,31
Belanja Hibah	26.280.400.000,00	22.179.165.000,00	84,39	26.470.650.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000,00	1.907.500.000,00	91,36	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>2.063.362.673.424,00</b>	<b>1.856.744.865.508,63</b>	<b>89,99</b>	<b>1.697.076.492.270,31</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah	44.996.686.904,00	31.076.114.929,33	69,06	20.326.281.017,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.430.263.947,00	137.366.786.670,00	86,70	61.199.821.105,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.450.398.906,00	167.062.262.023,43	91,57	156.394.852.365,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	931.943.867.474,00	841.680.661.519,92	90,31	550.373.428.011,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.487.113.700,00	3.083.438.453,00	88,42	782.190.470,00
Belanja Modal Dana BOS	39.685.077.400,00	26.507.779.506,58	66,80	28.102.452.648,79
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.360.993.408.331,00</b>	<b>1.206.777.043.102,26</b>	<b>88,67</b>	<b>817.179.025.617,07</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.693.960.756,00	33,88	1.033.828.109,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>1.693.960.756,00</b>	<b>33,88</b>	<b>1.033.828.109,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.429.356.081.755,00</b>	<b>3.065.215.869.366,89</b>	<b>89,38</b>	<b>2.515.289.345.996,38</b>
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.968.531.745,00	1.968.531.745,00	100,00	1.903.474.953,00
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>1.968.531.745,00</b>	<b>1.968.531.745,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.903.474.953,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(366.997.283.369,00)</b>	<b>278.336.094.156,69</b>	<b>(75,84)</b>	<b>183.113.443.122,39</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan SILPA	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98	100,00	184.675.840.246,59
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>366.997.283.369,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>	<b>100,00</b>	<b>184.675.840.246,59</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>366.997.283.369,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>	<b>100,00</b>	<b>183.883.840.246,59</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>645.333.377.525,67</b>	<b>100,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>

Samarinda, Juni 2020  
WALIKOTA SAMARINDA

  
H. SYAHARIE JA'ANG



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	AUDITED 2020	(%)	AUDITED 2019
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	242.910.000.000,00	314.002.648.362,68	129,27	369.978.459.595,73
4	Pendapatan Retribusi Daerah	41.216.529.000,00	42.755.656.314,00	103,73	49.520.199.223,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	8.010.873.971,19	80,11	12.482.957.095,38
6	Lain-lain PAD Yang Sah	98.601.350.000,00	120.420.315.073,46	122,13	128.463.241.448,69
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>392.727.879.000,00</b>	<b>485.189.493.721,33</b>	<b>123,54</b>	<b>560.444.857.362,80</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
9	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>				
10	Bagi Hasil Pajak	73.827.698.400,00	101.585.284.366,00	137,60	70.167.651.448,00
11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	323.049.912.000,00	527.291.122.431,00	163,22	770.820.147.637,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	675.500.904.000,00	670.356.522.000,00	99,24	707.113.978.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	260.057.456.000,00	230.887.008.922,00	88,78	256.326.317.367,00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>1.332.435.970.400,00</b>	<b>1.530.119.937.719,00</b>	<b>114,84</b>	<b>1.804.428.094.452,00</b>
15	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
16	Dana Penyesuaian	35.336.461.000,00	35.336.461.000,00	100,00	30.087.063.000,00
17	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>35.336.461.000,00</b>	<b>35.336.461.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.087.063.000,00</b>
18	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	290.340.596.000,00	286.846.897.483,00	98,80	392.307.362.271,00
20	Bantuan Keuangan				
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	439.042.500.000,00	439.042.500.000,00	100,00	475.603.398.182,78
22	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>729.383.096.000,00</b>	<b>725.889.397.483,00</b>	<b>99,52</b>	<b>867.910.760.453,78</b>
23	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>2.097.155.527.400,00</b>	<b>2.291.345.796.202,00</b>	<b>109,26</b>	<b>2.702.425.917.905,78</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
25	Pendapatan Hibah	102.935.723.000,00	96.300.745.000,00	93,55	82.649.720.000,00
26	<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>102.935.723.000,00</b>	<b>96.300.745.000,00</b>	<b>93,55</b>	<b>82.649.720.000,00</b>
27	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.592.819.129.400,00</b>	<b>2.872.836.034.923,33</b>	<b>110,80</b>	<b>3.345.520.495.268,58</b>

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	AUDITED 2020	(%)	AUDITED 2019
28	<b>BELANJA</b>				
29	<b>BELANJA OPERASI</b>				
30	Belanja Pegawai	1.280.116.457.348,00	1.216.845.222.333,00	95,06	1.268.404.148.597,19
31	Belanja Barang dan Jasa	523.026.957.955,00	467.029.982.649,81	89,29	564.254.051.911,44
32	Belanja Hibah	138.734.427.000,00	132.303.696.116,50	95,36	22.179.165.000,00
33	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.907.500.000,00
34	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.941.877.842.303,00</b>	<b>1.816.178.901.099,31</b>	<b>93,53</b>	<b>1.856.744.865.508,63</b>
35	<b>BELANJA MODAL</b>				
36	Belanja Modal Tanah	24.506.782.020,00	14.754.178.146,00	60,20	31.076.114.929,33
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.953.317.816,00	115.771.805.211,00	89,09	137.366.786.670,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.057.478.814,00	121.835.065.893,00	71,64	167.062.262.023,43
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	861.662.007.447,00	809.804.044.133,66	93,98	841.680.661.519,92
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.076.950.550,00	3.948.049.638,00	96,84	3.083.438.453,00
41	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00	26.507.779.506,58
42	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.190.256.536.647,00</b>	<b>1.066.113.143.021,66</b>	<b>89,57</b>	<b>1.206.777.043.102,26</b>
43	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
44	Belanja Tak Terduga	103.919.482.000,00	93.794.421.718,39	90,26	1.693.960.756,00
45	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>103.919.482.000,00</b>	<b>93.794.421.718,39</b>	<b>90,26</b>	<b>1.693.960.756,00</b>
46	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.236.053.860.950,00</b>	<b>2.976.086.465.839,36</b>	<b>91,97</b>	<b>3.065.215.869.366,89</b>
47	<b>TRANSFER</b>				
48	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
49	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.098.646.000,00	2.098.645.335,00	100,00	1.968.531.745,00
50	<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa</b>	<b>2.098.646.000,00</b>	<b>2.098.645.335,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.968.531.745,00</b>
51	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(645.333.377.550,00)</b>	<b>(105.349.076.251,03)</b>	<b>16,32</b>	<b>278.336.094.156,69</b>
52	<b>PEMBIAYAAN</b>				
53	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
54	Penggunaan SiLPA	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67	100,00	366.997.283.368,98
55	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>645.333.377.550,00</b>	<b>645.333.377.525,67</b>	<b>100,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>
56	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
57	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>645.333.377.550,00</b>	<b>645.333.377.525,67</b>	<b>100,00</b>	<b>366.997.283.368,98</b>
60	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>539.984.301.274,64</b>	<b>100,00</b>	<b>645.333.377.525,67</b>

Samarinda, Mei 2021  
**WALIKOTA SAMARINDA**  
  
**Drs. H. ANDI HARUN**